

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. LN No. 244 Tahun 2014. TLN No. 5587.

Indonesia. *Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601

Indonesia. *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU Nomor 17 Tahun 2014. LN No. 182. TLN No. 5568.

Indonesia. *Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*. PP Nomor 12 Tahun 2018

Indonesia. *Peraturan DPRD Kota Bogor Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Peraturan DPRD Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019. Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 84 Seri E.

Indonesia. *Keputusan DPRD Kota Bogor tentang Penetapan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Rakyat Daerah Kota Bogor*. Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 200-1 Tahun 2022.

B. Buku

Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung : PT Refika Aditama. 2010.

HR, Ridwan. *Hukum Adminitrasi Negara*. Depok : Rajawali Pers, 2018.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Depok : Rajawali Pers, 2017.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Pranadamedia Group, 2014.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta. 2002

Mihradi, R. Muhammad. *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2011.

Rosidin. Utang. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung : CV Pustakan Setia, 2010.

Sarja. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. 2016.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Wasistiono, Sadu ; dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung : Fokusmedia, 2009.

Wijaya, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

C. Lainnya

Abikusna, R. Agus. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah".

SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi, diterbitkan oleh FISIP-UMC. Volume XIII Nomor 01 Tahun 2019. Tersedia di : <https://e-journal.umc.ac.id/>, diakses tanggal 13 Oktober 2022.

Agustian, Rio Armanda. "Desain Otonomi Daerah Dalam Kerangka Penegasan Sistem Pemerintahan Presidensial". *Jurnal Hukum Progresif*, diterbitkan oleh Progresif : Jurnal Hukum. Volume XII No.2 2018. Tersedia di : <https://journal.ubb.ac.id/>, diakses tanggal 18 Januari 2023.

Badan Kepegawaian Daerah D. I. Yogyakarta, "Perkembangan Otonomi Daerah Masa Kini". Tersedia di : <https://bkd.jogjaprovo.go.id>, diakses tanggal 28 Januari 2023.

Basuki, Agung. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat". *Peer-reviewed Journal*, diterbitkan oleh Jurnal Lingkar Widyaiswara (*Widyaiswara Network Journal*). Edisi 07 No. 03 Tahun 2020., Tersedia di : <http://juliwi.com/>, diakses tanggal 27 Desember 2022.

Gandara, Moh. "Kewenangan Aribusi, Delegasi dan Mandat". *Khazanah Hukum*, diterbitkan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Volume 2 No. 3 Tahun 2020. Tersedia di : <https://journal.uinsgd.ac.id/>, diakses tanggal 12 Januari 2023.

Gunawan, Bambang Ady. "Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Al-Azhar Islamic Law Review*, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. Volume 1 No. 2 Tahun 2019. , Tersedia di : <https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/> , diakses tanggal 21 Januari 2023.

Gunawan, Wawan. "Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia". *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*. Volume1 No.1 2018. Tersedia di : <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/> , diakses tanggal 18 Januari 2023.

Guntoru, Mohamad. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah". Tersedia di <https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id> , diakses tanggal 15 April 2023.

Iswanto, Iwan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor. *Wawancara*. DPRD Kota Bogor, 27 Februari 2023.

Media Indonesia, "DPRD Kota Bogor: Ada Titik Temu Soal Relokasi Pedagang Plaza Bogor" Tersedia di <https://mediaindonesia.com/>, diakses pada tanggal 28 September 2023.

Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau*, ditebitkan ole Rumah Jurnal UINAM. Volume 8 No. 1 Juni Tahun 2021. Tersedia di : <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/> , diakses tanggal 3 Mei 2023.

Mulyono, Galih Puji, dkk. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia", *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 7 No. 2 Tahun 2019. Tersedia di : <http://e-journal.unipma.ac.id/> , diakses tanggal 21 Januari 2023.

Sanny, Honing, dkk. "Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Pancasila di Indonesia". *Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Volume 7, 2021. Tersedia di : <http://ejournal.uki.ac.id/> , diakses tanggal 18 Januari 2023.

Prihastuti, Diane. "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 19 No. 1 Tahun 2022. Tersedia di : <https://e-jurnal.peraturan.go.id/> , diakses tanggal 3 Mei 2023.

Puasa, Rafly Rilandi, dkk. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Volume 1 No. 1. Tahun 2018. Tersedia di : <https://ejournal.unsrat.ac.id/> , diakses tanggal 13 Oktober 2022.

Susanti, Linna. "DPRD tampung aspirasi pedagang soal revitalisasi Plaza Bogor". Tersedia di <https://megapolitan.antaranews.com>. diakses tanggal 28 September 2023.

Susanti, Linna. "Gelar Reses, DPRD Kota Bogor jaring empat masalah mendasar Kota Bogor". Tersedia di : <http://megapolitan.antarane.ws.com>. diakses tanggal 3 Januari 2023.

Syauqi dan Habibullah, " Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial". Tersedia di : <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 28 Januari 2023.